Kab. Nganjuk
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah pembangunan untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dan merupakan manifestasi dari respon Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta analisis yang efektif. Renstra ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam mencapai target dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 ini. Masukan maupun kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Renstra ini sangat kami harapkan. Semoga kita dapat menjalin kebersamaan serta saling bahu membahu mengaplikasikan program kerja dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK **14**
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 14
2.1.2 Sumber Daya 20
2.1.3 Kinerja Pelayanan 21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 43
2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan 44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 45
2.2.1 Identifikasi Permasalahan 45
2.2.2 Perumusan Isu Strategis 49
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **67**
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 67
3.2 Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 69
3.3 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 70
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **74**
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 74
4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 127

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 143
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) . 144
BAB V PENUTUP..... 146

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai menurut Pangkat dan Golongan 20
Tabel 2. 2 Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan 20
Tabel 2. 3 Neraca Pangan Strategis Tahun 2024 Per 31 Desember Tahun 2024 23
Tabel 2. 4 Data Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk per Tahun 2022 23
Tabel 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk 28
Tabel 2. 6 Perbandingan Nilai IKP 28
Tabel 2. 7 Skor PPH 30
Tabel 2. 8 Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 31
Tabel 2. 9 Hasil Analisis FSVA Kabupaten Nganjuk 33
Tabel 2. 10 Produksi Perikanan 35
Tabel 2. 11 Produksi Olahan Perikanan 35
Tabel 2. 12 Data Konsumsi Ikan Per Kapita 36
Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 38
Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 39
Tabel 2. 15 Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 46
Tabel 2. 16 Matriks Isu Strategis 52
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 68
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 70
Tabel 3. 3 Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis DKPP .. 71
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 75
Tabel 4. 2 Program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 101
Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 103
Tabel 4. 4 Daftar Program Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Pembangunan Daerah 127
Tabel 4. 5 Daftar Program Prioritas 139
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama 144
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci 145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk..... 15
Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi UPTD PBAT 18

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra

Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang selanjutnya diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 *Quick Wins* yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 serta visi, misi, dan program kepala daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati mengusung visi jangka menengah periode 2025-2029 yakni “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.

Isi Pembangunan yang terkait erat dengan urusan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk terdapat pada Misi Kelima yaitu “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal”. Misi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan tata kelola dan sistem layanan publik sektor pangan dan perikanan yang adaptif terhadap teknologi serta mendukung prinsip *good governance* dalam perencanaan dan pengelolaan program-program pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek

pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

26. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
27. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
29. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27);
46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 46);
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
50. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 13 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai pedoman umum dan arah kebijakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan lima tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan program prioritas serta indikatif pendanaan bagi penyelenggara pemerintah dan pelaksana pembangunan di Kabupaten Nganjuk khususnya sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
2. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
3. Sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan memuat:

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK

Pada Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk memuat:

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk memuat:

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;

2.1.2 Sumber Daya;

2.1.3 Kinerja Pelayanan;

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan; dan

2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk memuat:

2.2.1 Identifikasi Permasalahan;

2.2.2 Perumusan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

3.2 Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029; dan

3.3 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat:

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK

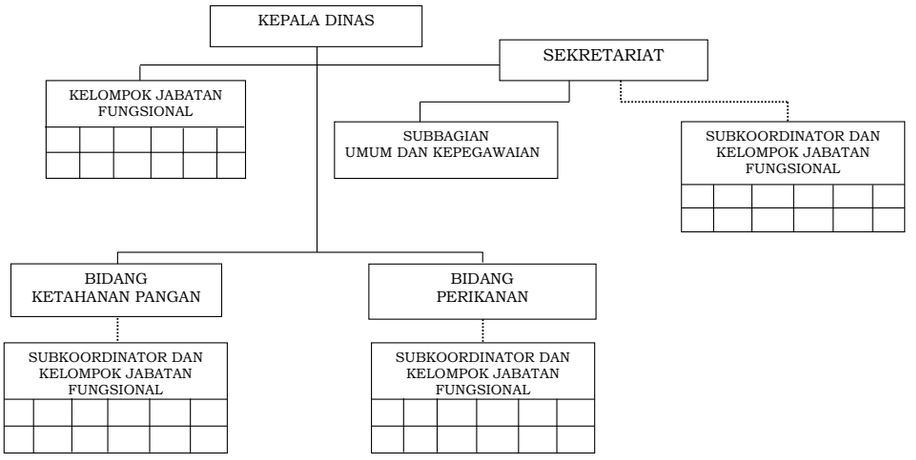
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

Uraian tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. Pembinaan aparatur;
e. Pengelolaan urusan kepegawaian;

f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan urusan persuratan;
b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi serta penganekaragaman pangan dan konsumsi. Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
g. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
h. Penyiapan koordinasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
i. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
j. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

IV. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan. Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
c. Pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perikanan meliputi perikanan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

V. UPTD PBAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksana teknis operasional di bidang pengolahan benih ikan dan melaksanakan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan.



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi UPTD PBAT

Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar

Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas pokok mengusulkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan, pemberian pertimbangan teknis, evaluasi serta pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional

a. Mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
b. Terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
c. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja; dan
e. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

f. Pelaksanaan kegiatan produksi dan penyediaan benih ikan unggul dan bermutu;
g. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan teknologi budidaya ikan;
h. Pelaksanaan uji mutu dan pengendalian penyakit ikan;
i. Pelaksanaan edukasi dan informasi teknologi pembenihan ikan dan sumber Pendapatan AsIi Daerah;
j. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional di lapangan;dan
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

2.1.2 Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Pada Bulan September Tahun 2025 pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebanyak 22 orang ASN. Adapun rincian pegawai ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Pegawai menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah PNS		
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PNS					
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	0	Orang
2.	Pembina Tingkat I	(IV/b)	0	0	Orang
3.	Pembina	(IV/a)	0	1	Orang
4.	Penata Tingkat I	(III/d)	4	3	Orang
5.	Penata	(III/c)	0	0	Orang
6.	Penata Muda Tingkat I	(III/b)	1	2	Orang
7.	Penata Muda	(III/a)	2	3	Orang
8.	Pengatur Tingkat I	(II/d)	1	1	Orang
Jumlah PNS			9	10	Orang
PPPK					
No.	Golongan		Laki-laki	Perempuan	
1.	VII		2	0	Orang
2.	V		0	1	Orang
Jumlah PPPK			2	1	Orang
JUMLAH ASN			**11**	**11**	**Orang**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Tabel 2. 2 Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS /PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Magister (S-2)	1	1	Orang
2.	Sarjana (S-1)	5	6	Orang
3.	Diploma IV (D-IV)	0	1	Orang
4.	Diploma III (D-III)	3	0	Orang
5.	Diploma II (D-II)	0	0	Orang
6.	Diploma I (D-I)	0	0	Orang
7.	SMA (Sederajat)	2	3	Orang
8.	SMP	0	0	Orang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS /PPPK	
		Laki-laki	Perempuan
9.	SD	0	0 Orang
JUMLAH		**11**	**11 Orang**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individu pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1).

B. Sarana dan Prasarana

Sedangkan, sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

a. Tanah: 4 bidang
b. Alat angkutan:
   1) Mobil: 4 unit
   2) Roda 3: 1 unit
   3) Sepeda motor: 15 unit
c. Gedung dan bangunan: 29 unit
d. Aset jalan, irigasi dan jembatan: 16 unit (UPTD PBAT Warujayeng)
e. Peralatan dan mesin: 191 unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai motor penggerak sektor pertanian dan perikanan, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor pertanian dan perikanan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi pertanian dan perikanan Kabupaten Nganjuk. Untuk itu peran ketahanan pangan dan perikanan dalam perekonomian adalah dengan meningkatnya ketahanan pangan melalui ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat serta produksi perikanan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk selama periode 2018-2023 telah melaksanakan fungsi pelayanan urusan ketahanan pangan dan perikanan sebagai berikut:

A. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas pelayanan sebagai berikut:

1) Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1.) produksi dalam negeri; (2.) pasokan pangan; dan (3.) pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah diatur Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan mandiri.

Data ketersediaan dan cadangan pangan disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 2. 3 Neraca Pangan Strategis Tahun 2024 Per 31 Desember Tahun 2024

No	Komoditas	Satuan	Ketersediaan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padi	Ton	411.989,45	285.963,20
2.	Jagung	Ton	350.558	35.538
3.	Kedelai	Ton	7.090,06	12.656
4.	Bawang Merah	Ton	122.281	34.284
5.	Bawang Putih	Ton	5.724,84	4.430,19
6	Cabe Besar	Ton	223,80	1.590,69
7.	Cabe Rawit	Ton	4.319,75	6.083,68
8.	Gula Pasir	Ton	41.163,50	13.700,62
9.	Minyak Goreng	Ton	30.576	25.519
10.	Daging Sapi	Ton	577,24	3.508,01
11.	Daging Ayam	Ton	8.489,95	26.642
12.	Telur	Ton	5.144,22	12.079,75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Capaian ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor pendorong diantaranya:

1. Nganjuk merupakan daerah sentra pertanian yang mendukung dalam penyediaan ketersediaan komoditas pangan;
2. Tersedianya lumbung pangan yang berada di sejumlah desa dalam menjaga ketersediaan pangan berupa cadangan pangan.

Tabel 2. 4 Data Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk per Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer,RMU,lainnya*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NGLUYU	Tempuran	Purwowidodo	2007	
2	GONDANG	Nglinggo	Marsudi Tani	2007	
3	GONDANG	Karangsemi	Sri Rejeki	2007	
4	SUKOMORO	Bagorwetan	Jogo Makmur	2007	Lantai Jemur
5	REJOSO	Klagen	Widodo	2007	

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer,RMU,lainnya*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	REJOSO	Wengkal	Margo Mulyo	2007	Lantai Jemur
7	REJOSO	Setren	Tani Rukun	2007	
8	LENGKONG	Bangle	Sumber Pangan	2007	
9	JATIKALEN	Jatikalen	Mekar Sari	2007	
10	JATIKALEN	Lumpangkuwik	Sido Dadi	2007	
11	BAGOR	Selorejo	Suko Widodo	2007	
12	WILANGAN	Wakung	Suko Widodo	2007	
13	SAWAHAN	Siwalan	Sido Asih	2007	
14	SAWAHAN	Bareng	Argo Dadi	2007	
15	PATIANROWO	Pisang	Sri Rejeki	2007	
16	PACE	Banaran	Rejo Mulyo	2007	RMU, L.Jemur
17	TANJUNGANOM	Sonobekel	Karya Usaha	2007	
18	BERBEK	Bulu	Prima Tani	2007	
19	NGETOS	Kuncir	Rukun Tani	2007	
20	LOCERET	Patihan	Tunas Harapan	2007	
21	NGRONGGOT	Kelutan	Tani Maju	2007	
22	BAGOR	Bagorkulon	Gunung Tani Jaya	2007	Lantai Jemur
23	REJOSO	Sidokare	Tani Makmur	2007	
24	REJOSO	Mungkung	Dewi Sri	2007	
25	WILANGAN	Mancon	Tani Makmur	2008	
26	LENGKONG	Sumbersono	Sumber Makmur	2008	
27	NGLUYU	Bajang	Upadi tani	2008	
28	NGLUYU	Gampeng	Sri Rahayu	2008	
29	NGLUYU	Gampeng	Sri Dewi	2008	
30	NGLUYU	Sugihwaras	Rukun Mulyo	2008	
31	NGLUYU	Tempuran	Tani Mulyo	2008	
32	NGLUYU	Ngluyu	Bina Taruna Tani	2008	
33	GONDANG	Senggowar	Dewi Sri	2008	
34	GONDANG	Balonggebang	Amanah Tani	2008	
35	TANJUNGANOM	Jogomerto	Rukun Santoso	2008	
36	REJOSO	Mlorah	Sido Mulyo	2008	
37	REJOSO	Klagen	Luhur	2008	
38	SUKOMORO	Nglundo	Sri Agung	2008	

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer,RMU,lainnya*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	JATIKALEN	Ngasem	Puji Rahayu	2008	
40	JATIKALEN	Dawuhan	Margo Makmur	2008	
41	JATIKALEN	Begendeng	Tani Mulyo	2008	
42	BAGOR	Karangtengah	Margo Basuki	2008	Lantai Jemur
43	REJOSO	Gempol	Tani Makmur	2008	
44	WILANGAN	Ngudikan	Kemakmuran	2008	
45	SAWAHAN	Margopatut	Sari suci	2008	
46	PATIANROWO	Ngepung	Margo Rukun	2008	
47	PATIANROWO	Tirtobinangun	Margo Utomo	2008	
48	NGRONGGOT	Banjarsari	Serbaguna	2008	Lantai Jemur
49	NGRONGGOT	Betet	Harapan baru	2008	Lantai Jemur
50	BERBEK	Sumberwindu	Sri Makmur	2009	Lantai Jemur
51	LOCERET	Sokorejo	Suko Maju	2009	Lantai Jemur
52	PACE	Kecubung	Tani Mulyo	2009	
53	REJOSO	Sidokare	Kemakmuran	2010	
54	REJOSO	Sambikerep	Rukun Tani	2010	
55	NGLUYU	Gampeng	Sri Sedono	2010	Lantai Jemur
56	JATIKALEN	Gondangwetan	Serba Usaha	2010	
57	GONDANG	Pandean	Puji Sri Mulyo	2010	
58	NGANJUK	Balong pacul	Tani Makmur	2010	
59	REJOSO	Ngangkatan	Pancasari	2010	
60	REJOSO	Mojorembun	Karya Abadi	2011	Lantai Jemur
61	NGRONGGOT	Cengkok	Tani Makmur	2011	
62	NGANJUK	Balong pacul	Budi Lestari	2011	Lantai Jemur
63	LOCERET	Candirejo	Ibu Bumi	2012	
64	NGLUYU	Lengkonglor	Sido Makmur	2012	
65	NGLUYU	Lengkonglor	Sri Makmur	2012	
66	BAGOR	Gandu	Karya Makmur	2013	Dreyer, RMU
67	BERBEK	Sendangbumen	Tani Makmur	2013	Lantai Jemur
68	NGLUYU	Gampeng	Sembodo Tani	2013	
69	PACE	Jetis	Muji Subur	2013	
70	BERBEK	Tiripan	Tani Adil	2013	
71	NGLUYU	Ngluyu	Rukun Karya	2013	Lantai Jemur
72	REJOSO	Talang	Guyub R. Tani	2013	
73	LOCERET	Sombron	Sumber Rejeki	2013	Lantai Jemur
74	PRAMBON	Kurungrejo	Karya Makmur	2013	Lantai Jemur

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer,RMU,lainnya*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	REJOSO	Talun	Tri Agung T.M	2013	
76	LOCERET	Putukrejo	Bina Sejahtera	2013	Lantai Jemur
77	NGLUYU	Sugihwaras	Swasembada	2013	
78	PACE	Banaran	Sido Mulyo	2013	
79	LOCERET	Nglaban	Rukun Makmur	2014	
80	BERBEK	Sumber urip	Sumber Makmur	2014	Lantai Jemur
81	LENGKONG	Jatipungur	Rukun Tani	2014	
82	WILANGAN	Sudimoroharjo	Bahagia	2014	Lantai Jemur
83	PATIANROWO	Rowomarto	Tani Bagiyo Mulyo	2014	
84	BAGOR	Sekar Putih	Mulya Jaya	2014	Lantai Jemur
85	BERBEK	Ngrawan	Tani Makmur	2014	Lantai Jemur
86	PRAMBON	Singkalanyar	Tani Jaya	2014	
87	NGRONGGOT	Trayang	Sekar Tani	2014	
88	BARON	Mabung	Podo Rukun	2014	Lantai Jemur
89	LOCERET	Kwagean	Sumber Makmur	2014	L.Jemur, RMU
90	SUKOMORO	Sumengko	Suko Makmur	2015	
91	BAGOR	Kutorejo	Sumber Pangan	2015	
92	NGLUYU	Sugihwaras	Sekar Arum	2015	
93	BERBEK	Mlilir	Tri Mulyo Tani	2018	L.Jemur, RMU
94	NGLUYU	Ngluyu	Rukun Abadi	2019	Lantai Jemur
95	NGLUYU	Gampeng	Binar Tani	2019	
96	NGLUYU	Gampeng	Arum Dalu	2019	Lantai Jemur
97	NGLUYU	Gampeng	Guna Bahagia	2019	Lantai Jemur
98	LOCERET	Kenep	Sido Ayem	2021	Lantai Jemur, Rumah RMU dan *Bed Dryer*
99	LOCERET	Genjeng	Raharjo	2021	Lantai Jemur
100	LOCERET	Sekaran	Sri Sedono	2022	Lantai Jemur, Rumah RMU dan *Bed Dryer*
101	BERBEK	Mlilir	Tri Mulyo Tani	2022	Lantai Jemur, Rumah RMU dan *Bed Dryer*

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer,RMU,lainnya*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
102	BAGOR	Kendalrejo	Ngudi Rejeki	2022	Lantai Jemur, Rumah RMU dan *Bed Dryer*
103	TANJUNGANOM	Kel. Tanjunganom	Tani Mulyo	2022	Lantai Jemur

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dimana semakin tinggi nilainya maka ketahanan pangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Adapun nilai IKP oleh Badan Pangan Nasional dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan).

Adapun nilai IKP dirilis secara periodik tahunan oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional, dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi. Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk

	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	81,98	82,17	81,82	83,68	84,88
Kategori	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)	6 (Sangat Tahan)

Sumber: Badan Pangan Nasional

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, indeks ketahanan pangan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Meskipun terjadi fluktuasi, kategori ketahanan tetap konsisten berada pada level 6 (Sangat Tahan) setiap tahunnya, yang menunjukkan stabilitas dan kekuatan dalam ketahanan pangan pada periode lima tahun terakhir.

Tabel 2. 6 Perbandingan Nilai IKP

IKP	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prov. Jawa Timur	79,90	79,70	79,85	82,46	83,86
Kab. Nganjuk	81,98	82,17	81,82	83,68	84,88

Sumber: Badan Pangan Nasional

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Nganjuk konsisten mencatat nilai IKP yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, baik Kabupaten Nganjuk maupun Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan IKP secara umum.

Pada tahun 2024, IKP Kabupaten Nganjuk mencapai 84,88, lebih tinggi dibandingkan provinsi yang berada di angka 83,86. Hal ini mencerminkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Nganjuk berada dalam kondisi lebih kuat dan stabil dibandingkan rata-rata provinsi secara keseluruhan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Nasional terdapat perubahan indikator yang digunakan pada perhitungan IKP, dimana semula IKP dihitung menggunakan 3 aspek

9 indikator menjadi 3 aspek 11 indikator. Berdasarkan hasil perhitungan IKP dengan 11 indikator, Kabupaten Nganjuk mendapat nilai IKP tahun 2024 sebesar 71,42 (prioritas 5 atau kategori tahan pangan). Data IKP 11 indikator sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 223.1 Tahun 2025 menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di Bidang Pangan.

2) Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kebijakan yang mendasari kegiatan Penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

3) Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (*food utility*) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Menurut Badan Pangan Nasional, standar kualitatif yang digunakan sebagai acuan dalam konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), dengan rata-rata kebutuhan per kapita per hari sebesar 2.400 kilokalori untuk energi dan 63 gram untuk protein. Sementara itu, untuk mengukur tingkat keragaman konsumsi pangan digunakan indikator Pola Pangan Harapan (PPH), di mana skor 100 mencerminkan pola konsumsi ideal.

Tabel 2. 7 Skor PPH

PPH	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasional	86,30	87,20	92,29	94,10	93,50
Prov. Jawa Timur	87,00	88,70	92,80	93,80	93,90
Kab. Nganjuk	82,80	91,30	80,80	91,00	91,70

Sumber: DKPP Kab. Nganjuk dan Badan Pangan Nasional

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Nganjuk masih berada di bawah skor PPH tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan skor PPH Kabupaten Nganjuk dari tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan mendekati keseimbangan gizi. Beberapa faktor yang

turut mendorong maupun menjadi tantangan dalam peningkatan Skor PPH antara lain adalah:

Faktor Pendorong:

1. Semakin banyak media penyebaran informasi yang bisa digunakan dalam edukasi konsumsi pangan;
2. Adanya program Makan Bergizi Gratis.

Tantangan:

1. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berpengaruh pada pola konsumsi;
2. Mempromosikan penganekaragaman konsumsi melalui pemanfaatan pangan lokal;
3. Meningkatkan produksi dan mengembangkan teknologi dalam pengolahan aneka pangan lokal pada UMKM.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Tabel 2. 8 Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

Energi (kkal/kap/hari)					**Protein (gram/kap/hari)**				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
4.352	3.597	3.061	2.129	5.153	171,9	142,34	118,6	61	148,76

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

4) Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi maupun stunting. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun sosial (transien). Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena; (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas*-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 Rentan Pangan Tinggi, Prioritas 2 Rentan Pangan Sedang, Prioritas 3 Rentan Pangan Rendah. Desa/kelurahan di prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 Tahan Pangan Rendah,

Prioritas 5 Tahan Pangan Sedang, Prioritas 6 Tahan Pangan Tinggi. Berikut hasil analisis FSVA Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024:

Tabel 2. 9 Hasil Analisis FSVA Kabupaten Nganjuk

Tahun	Prioritas (Desa)					
	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2021	1	7	16	68	118	74
2022	-	-	-	-	-	-
2023	0	0	2	5	10	267
2024	0	0	2	14	164	104

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, pemberian bantuan sosial dan pengembangan usaha produktif/UMKM;
2. Peningkatan akses air bersih;
3. Penyediaan tenaga kesehatan merata;
4. Pemanfaatan Teknologi Pertanian dan perlindungan lahan pertanian sebagai penyedia pangan masyarakat;
5. Menyediakan dan/atau mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat beserta sarana prasarana penunjang lainnya.

Dari beberapa upaya tersebut masih terdapat kendala/hambatan dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan diantaranya:

1. Masih belum memadainya infrastruktur dasar di daerah rawan pangan;
2. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah rawan pangan;

B. BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

1) Pelayanan Produksi Perikanan

Fasilitasi pelayanan perikanan yang dilakukan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat dengan memfasilitasi pelaku usaha perikanan baik perikanan budidaya dan non budidaya (tangkap) dalam peningkatan produksi perikanan Kabupaten Nganjuk. Fasilitasi perikanan budidaya bertujuan untuk mengembangkan potensi sumberdaya perikanan, mendorong peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana pendukung industri perikanan, serta percepatan pembangunan industri perikanan nasional (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016).

Fasilitasi perikanan tangkap dilakukan dengan melakukan kegiatan *restocking* dan pembinaan kelompok dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan mitra lembaga/kelompok non pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. *Restocking* adalah kegiatan penebaran bibit ikan atau benih ke perairan umum untuk menambah stok ikan tangkapan. Kegiatan *restocking* bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan pendapatan/taraf hidup masyarakat di sekitarnya dan kegiatan pembinaan dilakukan untuk membina meningkatkan kesejahteraan pelaku utama/usaha perikanan, pengelolaan sumberdaya yang sebaik-baiknya adalah dengan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan, serta terciptanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Berikut rekapitulasi data di Bidang Perikanan tahun 2020-2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Produksi Perikanan

No	Uraian Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	9.486,3	10.011	11.050	11.872,22	10.920
2	Jumlah produksi perikanan Non Budidaya	Ton	611,7	628	651,85	677,20	679

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Fasilitasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk tersebut berkontribusi langsung terhadap capaian produksi perikanan, baik budidaya maupun non-budidaya, sebagaimana terlihat pada tabel capaian kinerja tahun 2020-2024. Peningkatan produksi ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan ikan segar, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil perikanan.

Data jumlah produksi olahan hasil perikanan setiap bulan memberikan gambaran lebih rinci mengenai pemanfaatan hasil tangkapan dan budidaya menjadi produk bernilai tambah. Data ini sekaligus mencerminkan efektivitas rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2. 11 Produksi Olahan Perikanan

No	Bulan	Jumlah (Ton)		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	1,42	1,425	1,49
2	Februari	1,48	1,515	1,57
3	Maret	1,418	1,43	1,255
4	April	1,245	1,255	1,25

5	Mei	1,425	1,48	1,495
6	Juni	1,314	1,315	1,315
7	Juli	1,2	1,21	1,215
8	Agustus	1,4	1,425	1,495
9	September	1,18	1,165	1,155
10	Oktober	1,325	1,335	1,375
11	November	1,415	1,44	1,52
12	Desember	1,35	1,375	1,43
Total		16,172	16,37	16,565

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

2) Pelayanan Peningkatan Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Nganjuk memiliki tren kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 konsumsi ikan di Kabupaten Nganjuk mencapai 26 Kg/Kap/Tahun hingga pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 38,20 Kg/Kap/Tahun. Berikut data capaian Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2. 12 Data Konsumsi Ikan Per Kapita

No	**Tahun**	**Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2020	26
2.	2021	29,87
3.	2022	31,33
4.	2023	36,02
5.	2024	38,20

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan angka konsumsi ikan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan keberhasilan upaya dalam mendorong minat dan kesadaran masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk mengkonsumsi ikan. Hal ini menegaskan pentingnya ikan sebagai sumber protein, omega-3, dan berbagai zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh. Tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dipengaruhi oleh intensitas promosi, sosialisasi, serta pelatihan pengolahan hasil perikanan yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa beberapa faktor pendorong dan tantangan yang dihadapi, diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Minat berwirausaha di bidang perikanan masih cukup tinggi;
2. Dukungan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan;
3. Kabupaten Nganjuk memiliki potensi perikanan yang besar dengan adanya Bendungan Semantok dan termasuk kawasan yang dialiri Sungai Brantas.

Tantangan:

1. Tingginya harga pakan tidak dibarengi dengan inovasi pakan alternatif;
2. Tidak adanya sarana prasarana yang menunjang pemasaran hasil perikanan;
3. Masih rendahnya produksi benih unggul yang dapat memenuhi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Nganjuk;
4. Masih ditemukannya pelanggaran penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga dapat merusak ekosistem perairan.

Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan akses pangan bagi masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	318,3	318,8	319,3	319,7	204,77	249,94	297,17	300,94	320,20	424,28	78,53	93,22	94,25	100,16	207,29
		Ketersediaan Energi dan Protein perkapita - Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3.530	3.049	2.569	2.089	3.050	4.352	3.597	3.061	2.192	5.153	123,29	117,97	119,15	95,30	168,95
		- Ketersediaan Protein (gram/ kapita/Hari)	150,3	128,0	105,6	83,20	117,5	171,9	142,34	118,6	161,00	148,76	114,37	111,20	112,31	136,39	126,60
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan non budidaya serta penyediaan	Meningkatnya jumlah produksi: Perikanan Budidaya (ton)	11.835	11.844	11.858	11.871	10.520	9.486,3	10.011	11.050	11.872,22	10.920	80,15	84,52	92,8	100,01	103,80
		Perikanan Non Budidaya (ton)	655	666	678	668	635	611,7	628	651,850	677,20	679	93,38	94,29	96,1	101,38	103,98

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	sarana prasarana produksi perikanan dan pangsa pasar hasil produksi perikanan	Jumlah Ikan dikonsumsi oleh Masyarakat (kg/kapita/ tahun)	26,00	26,35	27,12	28,75	-	26,00	29,87	31,33	36,02	-	100	113,35	115,52	125,29	1.120,37
		Persentase Angka Konsumsi Ikan (%)	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	6,05	-	-	-	-	-

Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	289.259.400	-	-	-	-	263.522.122	-	-			91,10	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan	580.620.000	-	-	-	-	549.332.429	-	-			94,61	-	-		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Prasarana Aparatur															
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.000.000	-	-	-	-	1.600.000	-	-			80,00	-	-		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	-	-	-	-	18.502.000	-	-			92,51	-	-		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	3.715.222.700	4.407.939.050	4.856.865.218	5.120.311.391	-	3.276.539.812	3.927.062.140	4.335.600.561	4.692.429.824	-	88,19	89,09	89,27	91,64
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	312.965.000	-	-	-	-	239.074.050	-	-	-	-	76,39	-	-	-	-
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan	-	179.081.350	3.283.825.000	-	-	-	176.453.159	3.279.850.308	-	-	-	98,53	99,88	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kemandirian Pangan															
8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	697.585.650	398.248.300	1.073.619.900	2.058.176.350	-	692.362.400	185.768.250	1072774259	2.050.222.313	-	99,25	46,65	99,92	99,59
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	29.770.500	133.900.000	-	-	-	29.769.700	133,457.500	-	-	-	100	99,67
9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	43.535.000	23.026.000	38.609.500	91.835.500	-	36.430.050	21.766.910	38.586.300	89.880.595	-	83,68	94,53	99,94	97,87
10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.482.100.000	-	-	-	-	1.397.480.155	-	-	-	-	95,51	96,83	94,29	-	-
11	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,46	48,63	-	-	-
12	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,62	98,30	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Produksi Perikanan															
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	-	-	40.575.000	-	-	-	-	38.704.650	-	-	-	-	95,39
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	1.144.440.000	329.016.500	527.005.550	163.786.500	-	1.143.635.000	322.540.000	514.184.220	147.023.900	-	99,93	98,03	97,57	89,77
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	46.230.000	41.253.000	46.550.000	5.010.000	-	39.747.500	38.495.500	46.523.150	3.877.700	-	85,98	93,32	99,94	77,40
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	189.020.000	271.305.000	974.179.450	798.415.383	-	188.281.400	260.719.550	964.096.973	782.408.505	-	99,61	96,10	98,97	98,00

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk menetapkan sejumlah kelompok sasaran layanan dengan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah. Keberadaan kelompok sasaran layanan ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik sebagai pelaksana langsung, fasilitator, maupun sebagai penerima manfaat yang turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk antara lain:

1. Pelaku Usaha Pangan Segar dan Olahannya, yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan, distribusi, dan kualitas pangan yang aman dan bergizi di wilayah Kabupaten Nganjuk.
2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan, sebagai aktor lokal yang berperan dalam manajemen cadangan pangan masyarakat, penyimpanan komoditas, serta mendukung ketahanan pangan berbasis komunitas.
3. Pedagang Komoditas Pangan, yang berkontribusi dalam sistem logistik dan distribusi bahan pangan pokok serta mendukung stabilisasi harga dan keterjangkauan akses pangan bagi masyarakat.
4. Kelompok Usaha Perikanan, yang terdiri dari:
    a. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), yang terlibat langsung dalam kegiatan budidaya ikan air tawar.
    b. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan pengawasan kegiatan perikanan di perairan umum.
    c. Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar), yang fokus pada peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran produk olahan.

2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan publik yang efektif, efisien, dan terkoordinasi dalam urusan ketahanan pangan dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk menetapkan sejumlah mitra kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa mitra kerja ini mencakup instansi pemerintah daerah, lembaga vertikal, serta pemangku kepentingan strategis lainnya yang berperan penting dalam mendukung koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Mitra kerja Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk guna koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara lain:

1. Sekretariat Daerah, sebagai koordinator umum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam perencanaan, integrasi program, dan penganggaran.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dalam penguatan kapasitas aparatur dan pemenuhan SDM teknis.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran program ketahanan pangan dan perikanan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terkait pengembangan rantai pasok, distribusi pangan, dan stabilitas harga.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam fasilitasi investasi di sektor pangan dan perikanan.
7. Dinas Pertanian, sebagai mitra teknis dalam integrasi komoditas pangan dan pertanian strategis.
8. Dinas Kesehatan, dalam hal pengawasan mutu gizi, keamanan pangan, dan pencegahan stunting.
9. Dinas Perhubungan, untuk mendukung kelancaran logistic pangan dan produk perikanan.

10. Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengawasan dampak lingkungan dalam budidaya dan distribusi pangan.
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam dukungan infrastruktur irigasi dan sentra produksi pangan.
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), dalam edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang keluarga.
13. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam perlindungan kelompok rentan dan program bantuan pangan.
14. Perum Bulog, sebagai penyedia Cadangan pangan strategis dan stabilitas harga.
15. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai penyedia data statistik sektor pangan dan perikanan.
16. Aparat Penegak Hukum, dalam pengawasan distribusi dan penindakan pelanggaran pangan.
17. OKKPD Provinsi, sebagai otoritas pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dan hewan.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam hal sertifikasi dan pengujian keamanan pangan olahan.
19. Satminkal BPPP Banyuwangi, sebagai mitra dalam pelatihan, sertifikasi dan pembinaan SDM perikanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan tidak lepas dari permasalahan atau kendala dari berbagai dimensi baik itu dipengaruhi faktor eksternal maupun faktor internal sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai faktor akibat adanya potensi atau kekuatan lokal yang belum diberdayakan secara optimal, adanya kelemahan yang belum bisa teratasi, adanya peluang yang belum bisa dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Nganjuk serta aspirasi/harapan pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah maka dikemukakan permasalahan-permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Pemetaan Permasalahan dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	Belum stabilnya pasokan yang mengakibatkan inflasi harga pangan	- Masih kurangnya prasarana penyimpanan dingin - Masih belum optimalnya pemantauan pasokan dan harga pangan - Tidak adanya cadangan pangan pemerintah daerah - Kurangnya kualitas penyediaan data ketersediaan pangan
2	Peningkatan peran dan fungsi kelompok lumbung	Belum optimalnya cadangan pangan masyarakat	- Kesadaran kelompok lumbung dalam penyisihan cadangan pangan masih kurang - Kondisi gudang lumbung yang kurang layak - Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelompok lumbung pangan masih kurang
3	Kegiatan kelompok distribusi pangan tidak optimal	Peran kelembagaan distribusi pangan belum optimal	Keterbatasan jumlah kelembagaan distribusi pangan
4	Peningkatan penanganan kerawanan pangan	Masih ada desa rawan pangan di Kabupaten Nganjuk	Masih terbatasnya akses dalam menjangkau pangan
5	Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang B2SA	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pangan yang B2SA	- Pola konsumsi masyarakat secara umum masih tergantung pada satu komoditi yaitu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			beras sebagai sumber karbohidrat - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga - Kurang optimalnya publikasi dan promosi penganekaragaman pangan dan pangan lokal
6	Produk pangan segar asal tumbuhan masih rawan cemaran pestisida/bahan kimia	Adanya peredaran produk pangan segar yang mengandung cemaran/residu	Kurangnya kesadaran petani maupun pedagang tentang dampak negatif penggunaan pestisida/obat-obatan kimia
7	Manajemen kelembagaan kelompok perikanan belum berjalan dengan baik	Kelembagaan kelompok perikanan belum optimal	Jumlah kelompok kelas pemula masih cukup banyak sedangkan jumlah kelompok madya sedikit dan kelas utama tidak ada
8	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan non budidaya	Kurang optimalnya produksi perikanan budidaya dan non budidaya akibat kurangnya sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai	Sarana dan prasarana kelompok pembudidaya tidak memenuhi standar
9	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten masih rendah	Sosialisasi /kampanye GEMARIKAN belum optimal	Kebiasaan masyarakat untuk konsumsi ikan masih rendah
10	Kurangnya daya saing produk olahan hasil perikanan	Produksi olahan hasil perikanan masih rendah	- Jumlah Poklahsar perikanan masih sedikit/belum terdata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Masih rendahnya pengetahuan pengolah hasil perikanan terhadap mutu produk - Keterbatasan pemasaran - Keterbatasan sarana pengolahan yang dimiliki Poklahsar
11	Peningkatan peran UPTD PBAT dalam meningkatkan produksi perikanan dan akses pasar	- Belum optimalnya pembenihan ikan dan pembesaran ikan konsumsi - Keterbatasan Sumber Daya Manusia - Keterbatasan infrastruktur yang memadai - Belum optimalnya pemasaran hasil perikanan	- Masih adanya kondisi kolam yang mengalami kerusakan baik rusak ringan, sedang maupun berat - Kurangnya pengetahuan SDM dalam pembudidayaan ikan - Jumlah SDM yang berkompeten di bidang perikanan masih kurang - Sistem irigasi dan drainase yang buruk - Kurangnya debit air - Kurangnya akses pasar hasil budidaya yang luas
12	Tingginya biaya produksi terutama kebutuhan untuk biaya pakan	Produksi Perikanan mengalami penurunan	- Ketergantungan pembudidaya dengan pakan pabrikan masih cukup tinggi sedangkan harga pakan pabrikan mahal - Pembudidaya ikan di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh pembudidaya ikan skala kecil - Keterbatasan sarana dan prasarana budidaya maupun pembenihan yang dimiliki oleh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			pembudidaya maupun UPR
13	Keterbatasan jumlah dan kemampuan Petugas yang menangani penyakit ikan	Penanganan penyakit ikan belum optimal	Pembudidaya ikan terlambat memberikan laporan kejadian penyakit ikan
14	Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	Penjualan hasil perikanan kurang optimal	Pelaku usaha tidak mempunyai wadah/fasilitas untuk memasarkan hasil perikanannya

Tentunya dalam menangani permasalahan penyelenggaraan pembangunan ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala yang muncul dari dimensi internal maupun eksternal. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya interaksi dan dinamika perubahan yang terus berlangsung baik dampak dari potensi lokal yang belum sepenuhnya diberdayakan maupun ancaman yang belum dapat diantisipasi secara tepat sasaran seperti tercantum dalam tabel 2.15. Pada tabel 2.15 permasalahan yang diidentifikasi mencakup aspek stabilisasi pasokan pangan, cadangan pangan masyarakat, distribusi dan diversifikasi konsumsi hingga rendahnya daya saing produk dan akses pasar hasil perikanan. Akar masalah ini menunjukan perlunya pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas SDM. Sebagai tindak lanjut atas identifikasi permasalahan ini perlu disepakati rekomendasi strategis berupa perlunya kolaborasi lintas OPD terkait rangka mewujudkan kawasan agropolitan.

2.2.2 Perumusan Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan yang ada disandingkan dengan hasil telaah terhadap Rencana Strategis, Isu KLHS RPJMD, penelaahan implikasi kebijakan RTRW, isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang Pangan dan perikanan pada RPJMN (yang menjadi acuan perumusan Renstra K/L) serta RPJMD Provinsi Jawa Timur , maka diperoleh gambaran isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

A. Urusan Pangan
    1. Peningkatan sarana dan prasarana serta fungsi kelompok lumbung;
    2. Pengoptimalan kegiatan kelompok distribusi pangan;
    3. Peningkatan ketersediaan informasi harga dan pasokan serta stabilitas harga yang *up to date*, cepat dan memenuhi standar;
    4. Peningkatan penanganan kerawanan pangan;
    5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang B2SA;
    6. Daya saing produk olahan pangan berbasis sumber daya lokal masih lemah;
    7. Produk pangan segar asal tumbuhan masih rawan cemaran pestisida/bahan kimia;
    8. Keterbatasan sistem informasi pangan berbasis teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat;
    9. Rendahnya resiliensi sistem pangan terhadap perubahan iklim dan gangguan rantai pasok.

B. Urusan Perikanan
    1. Manajemen kelembagaan kelompok perikanan belum berjalan dengan baik;
    2. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Nganjuk masih rendah;
    3. Kurangnya daya saing produk olahan hasil perikanan;
    4. Peningkatan peran UPTD PBAT dalam menghasilkan benih dan pembesaran ikan konsumsi pada setiap komoditas jenis ikan;
    5. Tingginya biaya produksi terutama kebutuhan untuk biaya pakan;

6. Keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas yang menangani penyakit ikan;
7. Penyediaan akses pasar hasil perikanan;
8. Penguatan koordinasi antar pelaku usaha perikanan dalam rantai pasok dan sistem kemitraan;
9. Optimalisasi digitalisasi layanan dan pelaporan pada sektor perikanan budidaya dan tangkap.

Tabel 2. 16 Matriks Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Keberadaan kelompok lumbung pangan masyarakat	1. Belum optimalnya fungsi dan peran kelompok lumbung	1. Ketahanan Pangan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana	1. Ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal berkelanjutan a. Produksi pangan b. Munculnya isu geopolitik	1. Ketahanan pangan nasional a. Gangguan rantai pasok b. Gangguan cuaca	1. Kerawanan pangan a. Gagal panen b. Bencana alam	Peningkatan sarana dan fungsi kelompok lumbung
2	Akses wilayah pertanian dan distribusi pangan ke desa terpencil	2. Peran distribusi pangan belum optimal		2. Ketimpangan distribusi pangan antar negara a. Disrupsi rantai pasok global akibat krisis iklim	2. Ketimpangan akses distribusi pangan antar wilayah a. Daerah terpencil kesulitan akses logistik pangan		Pengoptimalan kegiatan kelompok distribusi pangan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				b. Infrastruktur distribusi belum merata			
3	Ketersediaan lahan dan hasil produksi pangan lokal	3. Minimnya data harga dan pasokan yang cepat dan akurat		3. Ketergantungan pada data pusat a. Ketidakstabilan pasokan komoditas pangan dunia b. Tidak optimalnya sistem peringatan dini harga dan pasokan pangan di daerah	3. Sistem informasi a. Keterbatasan sistem informasi harga dan pasokan nasional yang terintegrasi b. Kurang ketersediaan data lokal untuk perencanaan ketahanan pangan		Peningkatan ketersediaan informasi harga dan pasokan serta stabilitas harga

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Data spasial daerah rawan pangan dan iklim	4. Wilayah belum tertangani kerawanannya		4. Perubahan Iklim Wilayah a. Perubahan iklim ekstrem berdampak pada ketahanan pangan global b. Bencana iklim memperluas wilayah rawan pangan dunia c. Belum optimalnya sistem pemetaan kerawanan	4. Integrasi Data a. Masih minimnya integrasi data rawan pangan dan iklim b. Belum adanya pemetaan spasial kerawanan pangan spesifik area		Peningkatan penanganan kerawanan pangan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pangan nasional			
5	Keanekaragaman hasil pangan lokal	5. Konsumsi masyarakat belum beragam dan sehat		5. Komoditas pangan global a. Krisis iklim berdampak pada keberlangsungan varietas pangan lokal b. Kurangnya data dan penelitian varietas pangan lokal c. Minimnya pemanfaatan hasil pangan	5. Kebijakan pangan masih terpusat pada komunita utama a. Komoditas beras b. Komoditas jagung c. Komoditas kedelai	2. Terbatasnya promosi dan perlindungan terhadap pangan lokal khas daerah	Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				lokal dalam program ketahanan pangan daerah			
6	Produk olahan pangan lokal berbasis kearifan lokal dan komoditas unggulan daerah	6. Daya saing produk rendah			6. Kebijakan diversifikasi produk pangan lokal a. Rendahnya dukungan kebijakan diversifikasi pangan lokal b. Minimnya fasilitasi sertifikat produk UMKM		Penguatan daya saing produk pangan lokal

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Pemanfaatan lahan pertanian organik dan praktik pertanian ramah lingkungan	7. Rawan cemaran pestisida dan bahan kimia			7. Kurang edukasi dan pendampingan praktik pertanian ramah lingkungan a. Regulasi dan insentif pertanian organik masih terbatas b. Ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia c. Minimnya kawasan pertanian organik		Penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					berbasis komunitas		
8	Mendukung digitalisasi data, sistem informasi pangan, dan pengambilan keputusan berbasis teknologi	8. Keterbatasan teknologi dalam mendukung keputusan cepat				3. Ketimpangan teknologi a. Kesenjangan digital berdampak pada ketahanan pangan global b. Infrastruktur digital belum merata c. Minimnya integrasi data pangan	Penguatan sistem informasi pangan berbasis teknologi

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Membangun sistem ketahanan pangan adaptif dan resilien terhadap perubahan iklim	9. Rendahnya ketahanan terhadap perubahan iklim dan disrupsi pasok		6. Perubahan iklim dan disrupsi pasok a. Gangguan rantai pasok akibat bencana alam b. Belum ada model ketahanan pangan lokal berbasis cuaca ekstrem			Peningkatan resiliensi sistem pangan terhadap perubahan iklim dan rantai pasok
10	Adanya potensi sosial kelembagaan pada keberadaan kelompok tani, kelompok nelayan,	10. Manajemen kelembagaan belum berjalan baik		7. Krisis iklim global berdampak a. Berdampak pada produksi, distribusi, dan konsumsi	8. Sistem ketahanan pangan nasional a. Adanya keterbatasan terhadap bencana dan		Penguatan kelembagaan kelompok perikanan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan ekonomi pangan lokal			b. Ketidakpastian geopolitik memicu gangguan logistik	perubahan iklim b. Belum optimalnya perlindungan petani kecil dan komunitas lokal		
11	Kekayaan sumber daya perikanan lokal dan potensi diversifikasi olahan hasil laut	11. AKI masih rendah		8. Eksploitasi berlebih menyebabkan penurunan stok ikan dunia a. Kebutuhan peningkatan konsumsi protein laut		4. Kebutuhan konsumsi ikan a. Kurangnya promosi gizi berbasis ikan lokal b. Terbatasnya inovasi olahan hasil	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dalam menghadapi malnutrisi global		laut di daerah	
12	Hasil tangkapan ikan lokal dan pelaku UMKM olahan hasil perikanan	12. Daya saing rendah		9. Produk pasar global berstandar tinggi a. Persaingan ekspor produk olahan antar negara pesisir	9. Produk perikanan berstandar tinggi a. Kurangnya hilirisasi hasil tangkapan lokal b. Belum terbangunnya branding produk unggulan lokal	5. Daya saing produk perikanan a. Akses pasar UMKM perikanan daerah masih terbatas b. Promosi hasil produk unggulan lokal	Peningkatan daya saing produk olahan hasil perikanan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Ketersediaan UPTD PBAT dan tenaga teknis pembenihan lokal	13. Peran UPTD PBAT belum optimal				6. Distribusi ketersediaan pembenihan a. Kebutuhan peningkatan kapasitas dan teknologi hatchery b. Pelatihan teknis bagi petugas pembenihan lokal	Peningkatan peran UPTD PBAT dalam pembenihan ikan
14	Ketersediaan bahan baku lokal untuk pakan alternatif serta praktik efisiensi	14. Biaya produk membebani petani ikan			10. Harga pakan a. Ketergantungan pada impor bahan baku pakan	7. Bahan baku pakan a. Belum optimal	Pengendalian biaya produksi terutama pakan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	produksi di kalangan pembudidaya				meningkatkan kerentanan global b. Kurangnya kebijakan insentif terhadap inovasi pakan lokal	bahan baku pakan lokal b. Minimnya riset daerah dan pendampingan teknis untuk produksi pakan efisien	
15	Ketersediaan SDM teknis perikanan dan fasilitas UPTD untuk pengendalian penyakit ikan	15. Terbatasnya petugas dan sarana penanganan penyakit ikan	2. Keterbatasan kapasitas tenaga teknis dan infrastruktur dalam pengendalian penyakit ikan	10. Kapasitas SDM a. Kesenjangan kapasitas tenaga teknis perikanan antar negara	11. Kapasitas SDM a. Keterbatasan tenaga teknis pembenihan dan kesehatan ikan b. Ketergantungan pada pusat	8. Sarana Prasarana Penanganan Penyakit ikan a. Minimnya laboratorium dan fasilitas diagnostik	Penguatan sistem pengendalian dan kapasitas petugas penyakit ikan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				b. Ancaman penyakit ikan lintas negara	untuk pengendalian penyakit ikan	penyakit ikan daerah b. Kurangnya koordinasi lintas kabupaten dalam penanggulangan wabah ikan	
16	Sentra produksi perikanan lokal dan komunitas nelayan kecil	16. Akses pasar lemah dan terbatas		11. Persaingan pasar produk perikanan skala global	12. Dominasi Pasar Besar a. Dominasi pasar besar terhadap rantai pasok hasil perikanan	9. Persaingan hasil perikanan a. Kurangnya dukungan promosi produk lokal b. Minimnya platform	Penyediaan akses pasar hasil perikanan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					b. Akses terbatas nelayan kecil ke pasar digital	distribusi hasil perikanan regional	
17	Forum atau jejaring kemitraan pelaku usaha perikanan dan pangan lokal	17. Lemahnya koordinasi dan sistem kemitraan		12. Standarisasi Kemitraan Global a. Tuntutan standar dan sertifikasi global dalam kemitraan usaha b. Ketergantungan bahan baku luar negeri dalam proses olahan		10. Ekosistem Kemitraan Pelaku Usaha a. Lemahnya ekosistem kemitraan lokal antar pelaku usaha b. Belum adanya klasterisasi industri pengolahan	Penguatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku usaha perikanan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DKPP	Permasalahan DKPP	Isu KLHS relevan dengan DKPP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						hasil perikanan daerah	
18	Akses internet pedesaan dan pelaku usaha perikanan yang mulai terdigitalisasi	18. Belum optimalnya layanan digital sektor budidaya dan tangkap		13. Kesenjangan akses perikanan a. Revolusi industri 4.0 dan ketimpangan transformasi digital b. Tuntutan digitalisasi layanan publik secara global	13. Infrastruktur TIK a. Keterbatasan Teknologi di daerah pedesaan b. Rendahnya literasi digital pada komunitas nelayan	11. Akses Layanan Internet a. Ketimpangan akses internet antar desa b. Belum optimalnya integrasi data dan layanan digital sektor perikanan	Optimalisasi digitalisasi layanan dan pelaporan pada sektor perikanan budidaya dan tangkap

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan strategis, yaitu:

"Meningkatnya ketahanan pangan daerah"

Tujuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam tiga sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.
2. Mengurangi kerawanan pangan, khususnya di wilayah rentan.
3. Meningkatnya produksi perikanan.

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Periode 2025-2029 pada Misi ke 5: "*Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal",* dengan mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal. Dalam mendukung misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan misi ini melalui penguatan ketahan pangan berbasis lokal, pemberdayaan pelaku usaha pangan lokal, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya ikan sebagai pelaku utama sektor perikanan daerah.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan											
- Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	71,42	73,66	75,21	76,75	77,27	78,05	78,57	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,70	92,77	93,37	93,97	94,57	95,17	95,77	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	-7,57	1	1	1	1	1	1	

3.2 Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dikembangkan untuk menjamin bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya pada Misi ke 5. Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk difokuskan pada langkah-langkah yang bersifat transformasional, yang menciptakan nilai tambah, menjawab isu strategis daerah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), antara lain:

A. Meningkatkan pertumbuhan cadangan pangan melalui penguatan kelembagaan lumbung dan sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan.
B. Mewujudkan capaian konsumsi pangan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) melalui pemberdayaan rumah tangga dan edukasi B2SA.
C. Meningkatkan keamanan pangan *pre* dan *post market* guna menjamin mutu dan kesehatan masyarakat.
D. Menurunkan angka kerawanan pangan, dengan prioritas intervensi wilayah desa rawan pangan.
E. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya perikanan melalui peningkatan produksi, akses pasar, dan penguatan kelembagaan.
F. Meningkatkan efektivitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, guna mendorong daya saing sektor perikanan lokal.

Strategi ini juga menjadi peta jalan untuk mendukung indikator utama dalam RPJMD seperti Indeks Ketahanan Pangan, Pola Pangan Harapan, dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Memperkuat pondasi pada pemenuhan konsumsi (finalisasi *baseline* data ketahanan dan kerawanan pangan serta data perikanan), penguatan kelembagaan dan perencanaan terpadu.	Mendorong diversifikasi pangan lokal dan percepatan pola konsumsi B2SA berbasis potensi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan edukasi gizi masyarakat serta pengembangan inovasi pakan lokal untuk mendukung peningkatan produksi perikanan.	Mendorong penguatan lumbung pangan masyarakat dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan serta distribusi dan pemasaran, revitalisasi bidang perikanan.	Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis lokal dengan fokus akses pasar, digitalisasi rantai pasok pangan dan perikanan serta penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pelatihan keterampilan masyarakat.	Memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.	Mewujudkan kawasan agropolitan berbasis potensi pangan lokal.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029;
b. Isu Strategis yang diidentifikasi melalui RPJMD dan KLHS; serta
c. Perkembangan kebutuhan masyarakat di sektor pangan dan perikanan.

Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk difokuskan pada intervensi utama sebagai berikut:

a. Bidang Ketahanan Pangan
    1. Pengelolaan cadangan pangan daerah.
    2. Penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan pangan.
    3. Penyaluran pangan untuk wilayah rentan dan desa rawan pangan.

4. Pemberdayaan masyarakat dalam konsumsi pangan B2SA.
5. Promosi diversifikasi pangan lokal.
6. Pelaksanaan standarisasi keamanan pangan.
7. Penguatan kelembagaan pengawasan pangan.
8. Pengawasan pangan *pre* dan *post market*.
9. Penyusunan dokumen daerah rawan pangan.
10. Penanganan intervensi desa rawan pangan.

b. Bidang Perikanan

1. Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya ikan.
2. Pengembangan kelompok pembudidaya ikan dan penguatan kelembagaan.
3. Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
4. Penyediaan data produksi budidaya dan tangkap.
5. Fasilitasi pelaku usaha hasil perikanan.
6. Penyediaan data pengolah dan pemasaran.
7. Peningkatan AKI (Angka Konsumsi Ikan).
8. Penguatan akses pasar dan digitalisasi layanan perikanan.

Tabel 3. 3 Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis DKPP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD NGANJUK 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan konsumsi pangan dan penguatan cadangan pangan (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	Percepatan Pembangunan Bidang Sosial (kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui peningkatan akses hak-hak dasar masyarakat miskin atau termarjinalkan)	- Pengelolaan cadangan pangan - Penyediaan sarana prasarana penyimpanan pangan - Penyaluran pangan untuk wilayah rentan dan desa rawan pangan - Pemberdayaan masyarakat dalam konsumsi pangan B2SA	Urusan Ketahanan Pangan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD NGANJUK 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Promosi diversifikasi pangan lokal	
2	Pelaksanaan pengawasan dan jaminan keamanan pangan segar	Penguatan Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Daerah	- Pelaksanaan standarisasi keamanan pangan - Penguatan kelembagaan pengawasan pangan - Pengawasan pangan *pre* dan *post market*	Urusan Ketahanan Pangan
3	Penanganan wilayah rawan pangan berbasis data KLHS dan ketahanan pangan daerah	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup	- Penyusunan dokumen daerah rawan pangan - Penanganan intervensi desa rawan pangan	Urusan Ketahanan Pangan
4	Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan (Permen KP No. 52 Tahun 2016)	Aksesibilitas dan Infrastruktur: Penguatan Mobilitas dan Logistik	- Ketersediaan sarana dan prasarana budidaya ikan - Pengembangan kelompok pembudidaya ikan dan penguatan kelembagaan - Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya - Penyediaan data produksi budidaya dan tangkap	Urusan Perikanan
5	Penguatan kelembagaan, pemasaran, dan konsumsi ikan	Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Nganjuk	- Fasilitasi pelaku usaha hasil perikanan	Urusan Perikanan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD NGANJUK 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Penyediaan data pengolah dan pemasaran - Peningkatan AKI (Angka Konsumsi Ikan) - Penguatan akses pasar dan digitalisasi layanan perikanan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan, program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 tersaji sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan							
Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Pegawai yang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Sesuai dengan Aturan			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perkantoran yang Tepat Waktu dan Akurat			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang Mamadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas		Persentase infrastruktur cadangan pangan dalam kondisi baik	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Pangan dan Pendukungnya dalam Kondisi Baik	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan Cadangan Pangan		Persentase cadangan pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Terkelolanya Cadangan Pangan dengan Baik	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Jumlah LPM yang terfasilitasi	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya pangan segar yang aman		Persentase uji sampel yang aman	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Terlaksananya Standarisasi Keamanan Pangan pada Pangan Segar sesuai Ketentuan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
				Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan yang Sesuai Standar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan Keamanan Pangan Segar pada	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Kelembagaan Pangan yang Sesuai Standar			
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi sesuai AKG	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok yang Berkualitas	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Informasi Stok Pangan	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Konsumsi Pangan yang B2SA	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Menurunnya desa rawan pangan		Persentase desa rawan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersedianya Dokumen Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan yang Akurat	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terlaksananya Penanganan Desa Kerawanan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pangan yang Tepat			
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produksi Perikanan			Persentase peningkatan produksi perikanan		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Data Produksi Perikanan Tangkap yang Akurat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Memadai	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Terlaksananya Penguatan Pelaku Usaha	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perikanan Tangkap yang Meningkat Kapasitasnya			
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Memadai	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Tersedianya Data Produksi Perikanan Budidaya yang Akurat	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Baik	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terjaminnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Memadai	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Tersedianya Fasilitasi Perizinan bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Baik dan Sesuai Standar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Tersedianya Data Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Akurat	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Tersedianya Fasilitasi Mutu Hasil bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Baik dan Sesuai Standar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Fasilitasi Pengolahan Hasil bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Memadai	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Produksi Olahan Perikanan untuk Memenuhi Konsumsi Masyarakat	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4. 2 Program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					14.463.636.000,00		14.648.711.000,00		15.026.146.000,00		15.390.901.000,00		15.732.705.000,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.957.636.000,00		8.043.636.000,00		8.138.636.000,00		8.223.636.000,00		8.289.136.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75.35	75.5	76	7.957.636.000,00	77	8.043.636.000,00	78.5	8.138.636.000,00	80	8.223.636.000,00	81.5	8.289.136.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.712.000.000,00		1.714.000.000,00		1.716.000.000,00		1.718.000.000,00		1.720.000.000,00	
Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas	Persentase infrastruktur cadangan pangan dalam kondisi baik (%)	42.71	43.68	44.66	1.712.000.000,00	45.63	1.714.000.000,00	46.6	1.716.000.000,00	47.57	1.718.000.000,00	48.54	1.720.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					4.394.000.000,00		4.471.075.000,00		4.731.510.000,00		4.989.265.000,00		5.248.569.000,00	
Meningkatkan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	100	100	100	2.724.000.000,00	100	2.693.075.000,00	100	2.830.110.000,00	100	2.972.625.000,00	100	3.109.365.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	Persentase angka konsumsi sesuai AKG (%)	88.86	100	100	1.670.000.000,00	100	1.778.000.000,00	100	1.901.400.000,00	100	2.016.640.000,00	100	2.139.204.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					195.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00	
Menurunnya desa rawan pangan	Persentase desa rawan pangan (%)	0.7	0.7	0.7	195.000.000,00	0.7	200.000.000,00	0.7	210.000.000,00	0.7	215.000.000,00	0.7	220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					205.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		255.000.000,00	
Meningkatnya pangan segar yang aman	Persentase uji sampel yang aman (%)	100	100	100	205.000.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	100	245.000.000,00	100	255.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.386.000.000,00		5.920.000.000,00		2.973.000.000,00		3.068.000.000,00		3.116.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					387.000.000,00		3.804.000.000,00		805.000.000,00		821.000.000,00		822.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0.2	1	1	387.000.000,00	1	3.804.000.000,00	1	805.000.000,00	1	821.000.000,00	1	822.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.197.000.000,00		1.254.000.000,00		1.285.000.000,00		1.331.000.000,00		1.357.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-8.02 %	1	1	1.197.000.000,00	1	1.254.000.000,00	1	1.285.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.357.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					802.000.000,00		862.000.000,00		883.000.000,00		916.000.000,00		937.000.000,00	
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan (%)	1.19	1.25	1.26	802.000.000,00	1.27	862.000.000,00	1.28	883.000.000,00	1.29	916.000.000,00	1.30	937.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
TOTAL KESELURUHAN					16.849.636.000,00		20.568.711.000,00		17.999.146.000,00		18.458.901.000,00		18.848.705.000,00	

Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14.463.636.000,00		14.648.711.000,00		15.026.146.000,00		15.390.901.000,00		15.732.705.000,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.957.636.000,00		8.043.636.000,00		8.138.636.000,00		8.223.636.000,00		8.289.136.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75.35	76	7.957.636.000,00	77	8.043.636.000,00	78.5	8.138.636.000,00	80	8.223.636.000,00	81.5	8.289.136.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				210.000.000,00		218.000.000,00		226.000.000,00		234.000.000,00		242.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	2	210.000.000,00	2	218.000.000,00	2	226.000.000,00	2	234.000.000,00	2	242.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	2		2		2		2		3			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	2	165.000.000,00	2	170.000.000,00	2	175.000.000,00	2	180.000.000,00	3	185.000.000,00		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2	9.000.000,00	2	9.500.000,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	2	11.000.000,00		
2.09.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	2	9.000.000,00	2	9.500.000,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	2	11.000.000,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	7	17.000.000,00	7	19.000.000,00	7	21.000.000,00	7	23.000.000,00	7	25.000.000,00		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.711.636.000,00		4.711.636.000,00		4.711.636.000,00		4.711.636.000,00		4.711.636.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00		
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.656.636.000,00		4.656.636.000,00		4.656.636.000,00		4.656.636.000,00		4.656.636.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00	21	4.656.636.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	18		18		18		18		18			
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	18	35.000.000,00	18	35.000.000,00	18	35.000.000,00	18	35.000.000,00	18	35.000.000,00		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.09.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				203.000.000,00		213.000.000,00		222.000.000,00		232.000.000,00		242.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	21	131.000.000,00	21	137.000.000,00	21	142.000.000,00	21	148.000.000,00	21	154.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	21		21		21		21		21			
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	21	110.000.000,00	21	115.000.000,00	21	120.000.000,00	21	125.000.000,00	21	130.000.000,00		
2.09.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				21.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	21	21.000.000,00	21	22.000.000,00	21	22.000.000,00	21	23.000.000,00	21	24.000.000,00		
Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Pegawai yang Sesuai dengan Aturan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	63.000.000,00	1	66.000.000,00	1	69.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				63.000.000,00		66.000.000,00		69.000.000,00		72.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	63.000.000,00	1	66.000.000,00	1	69.000.000,00	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00		
2.09.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				569.500.000,00		592.000.000,00		614.500.000,00		637.000.000,00		659.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Layak Pakai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	280.000.000,00	1	293.000.000,00	1	306.000.000,00	1	319.000.000,00	1	332.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	21.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.000.000,00		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000,00		19.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	1	21.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	210.000.000,00	1	215.000.000,00	1	220.000.000,00	1	225.000.000,00	1	230.000.000,00		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	289.500.000,00	4	299.000.000,00	4	308.500.000,00	4	318.000.000,00	4	327.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	16.000.000,00	4	17.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.500.000,00		16.000.000,00		16.500.000,00		17.000.000,00		17.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	15.500.000,00	4	16.000.000,00	4	16.500.000,00	4	17.000.000,00	4	17.500.000,00		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	12	225.000.000,00	12	230.000.000,00	12	235.000.000,00	12	240.000.000,00	12	245.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				33.000.000,00		36.000.000,00		39.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	4	33.000.000,00	4	36.000.000,00	4	39.000.000,00	4	42.000.000,00	4	45.000.000,00		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.130.000.000,00		1.150.000.000,00		1.180.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	10	1.130.000.000,00	10	1.150.000.000,00	10	1.180.000.000,00	10	1.200.000.000,00	10	1.200.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10		10		10				10			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2		2		2		2		2			
2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00		
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				110.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	120.000.000,00		120.000.000,00	10	120.000.000,00		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				320.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	10	320.000.000,00	10	340.000.000,00	10	360.000.000,00	10	380.000.000,00	10	380.000.000,00		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385.500.000,00		403.000.000,00		420.500.000,00		438.000.000,00		455.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang Mamadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	385.500.000,00	4	403.000.000,00	4	420.500.000,00	4	438.000.000,00	4	455.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	3	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Air dan Listrik yang Disediakan													
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	8.500.000,00	4	9.000.000,00	4	9.500.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.000.000,00		169.000.000,00		181.000.000,00		193.000.000,00		205.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	12	157.000.000,00	12	169.000.000,00	12	181.000.000,00	12	193.000.000,00	12	205.000.000,00		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				220.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21	12	220.000.000,00	12	225.000.000,00	12	230.000.000,00	12	235.000.000,00	12	240.000.000,00		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				738.000.000,00		746.000.000,00		754.000.000,00		761.000.000,00		769.000.000,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Layak Pakai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	15	738.000.000,00	15	746.000.000,00	15	754.000.000,00	15	761.000.000,00	15	769.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	19		19		19		19		19			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	2	115.000.000,00	2	120.000.000,00	2	125.000.000,00	2	130.000.000,00	2	135.000.000,00		
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	19	180.000.000,00	19	180.000.000,00	19	180.000.000,00	19	180.000.000,00	19	180.000.000,00		
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	15	16.000.000,00	15	17.000.000,00	15	18.000.000,00	15	19.000.000,00	15	20.000.000,00		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.000.000,00		29.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	15	27.000.000,00	15	29.000.000,00	15	31.000.000,00	15	32.000.000,00	15	34.000.000,00		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				1.712.000.000,00		1.714.000.000,00		1.716.000.000,00		1.718.000.000,00		1.720.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas	Persentase infrastruktur cadangan pangan dalam kondisi baik	42.71	44.66	1.712.000.000,00	45.63	1.714.000.000,00	46.6	1.716.000.000,00	47.57	1.718.000.000,00	48.54	1.720.000.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.712.000.000,00		1.714.000.000,00		1.716.000.000,00		1.718.000.000,00		1.720.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Pangan dan Pendukungnya dalam Kondisi Baik	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	1	1.712.000.000,00	1	1.714.000.000,00	1	1.716.000.000,00	1	1.718.000.000,00	1	1.720.000.000,00		
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	1		1		1		1		1			
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN				4.394.000.000,00		4.471.075.000,00		4.731.510.000,00		4.989.265.000,00		5.248.569.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatkan Cadangan Pangan	Persentase cadangan pangan	100	100	2.724.000.000,00	100	2.693.075.000,00	100	2.830.110.000,00	100	2.972.625.000,00	100	3.109.365.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				2.724.000.000,00		2.693.075.000,00		2.830.110.000,00		2.972.625.000,00		3.109.365.000,00		
Terkelolanya Cadangan Pangan dengan Baik	Jumlah LPM yang terfasilitasi	0	5	2.724.000.000,00	5	2.693.075.000,00	5	2.830.110.000,00	5	2.972.625.000,00	5	3.109.365.000,00		
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0	114.77		114.77		114.77		114.77		114.77			
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40	114.77		114.77		114.77		114.77		114.77			
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0	114.77		114.77		114.77		114.77		114.77			
2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				210.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0	2	210.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2.047.500.000,00		2.149.875.000,00		2.257.500.000,00		2.370.375.000,00		2.489.000.000,00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40	114.77	2.047.500.000,00	114.77	2.149.875.000,00	114.77	2.257.500.000,00	114.77	2.370.375.000,00	114.77	2.489.000.000,00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				52.500.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		68.250.000,00		
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0	114.77	52.500.000,00	114.77	55.000.000,00	114.77	60.000.000,00	114.77	65.000.000,00	114.77	68.250.000,00		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan				84.000.000,00		88.200.000,00		92.610.000,00		97.250.000,00		102.115.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pangan Pemerintah Kab/Kota														
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0	114.77	84.000.000,00	114.77	88.200.000,00	114.77	92.610.000,00	114.77	97.250.000,00	114.77	102.115.000,00		
2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)				330.000.000,00		350.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	0	5	330.000.000,00	5	350.000.000,00	5	370.000.000,00	5	390.000.000,00	5	400.000.000,00		
Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	Persentase angka konsumsi sesuai AKG	88.86	100	1.670.000.000,00	100	1.778.000.000,00	100	1.901.400.000,00	100	2.016.640.000,00	100	2.139.204.000,00		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.255.000.000,00		1.358.000.000,00		1.466.400.000,00		1.576.640.000,00		1.684.204.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok yang Berkualitas	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0	1	1.255.000.000,00	1	1.358.000.000,00	1	1.466.400.000,00	1	1.576.640.000,00	1	1.684.204.000,00		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0	4		4		4		4		4			
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4	5		5		5		5		5			
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0	13		13		13		13		13			
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	0	12		12		12		12		12			
	Informasi Stok Pangan	0	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				230.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4	4	230.000.000,00	4	250.000.000,00	4	270.000.000,00	4	290.000.000,00	4	300.000.000,00		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	50	80.000.000,00	50	85.000.000,00	50	90.000.000,00	50	95.000.000,00	50	100.000.000,00		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		644.204.000,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0	4	440.000.000,00	4	484.000.000,00	4	532.400.000,00	4	585.640.000,00	4	644.204.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0	4	85.000.000,00	4	90.000.000,00	4	95.000.000,00	4	100.000.000,00	4	105.000.000,00		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				155.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4	5	155.000.000,00	5	160.000.000,00	5	165.000.000,00	5	170.000.000,00	5	175.000.000,00		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	0	12	80.000.000,00	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	0	12	80.000.000,00	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				13.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0	13	13.000.000,00	13	15.000.000,00	13	18.000.000,00	13	18.000.000,00	13	20.000.000,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				415.000.000,00		420.000.000,00		435.000.000,00		440.000.000,00		455.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Konsumsi Pangan yang B2SA	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3	1	415.000.000,00	1	420.000.000,00	1	435.000.000,00	1	440.000.000,00	1	455.000.000,00		
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0	2		2		2		2		2			
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				120.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				195.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		
Menurunnya desa rawan pangan	Persentase desa rawan pangan	0.7	0.7	195.000.000,00	0.7	200.000.000,00	0.7	210.000.000,00	0.7	215.000.000,00	0.7	220.000.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan yang Akurat	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Desa Kerawanan Pangan yang Tepat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				205.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		255.000.000,00		
Meningkatnya pangan segar yang aman	Persentase uji sampel yang aman	100	100	205.000.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	100	245.000.000,00	100	255.000.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				205.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		255.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan yang Sesuai Standar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Keamanan Pangan Segar pada Kelembagaan Pangan yang Sesuai Standar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	58	10	65.000.000,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00	10	80.000.000,00	10	85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	58	10	65.000.000,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00	10	80.000.000,00	10	85.000.000,00		
Terlaksananya Standarisasi Keamanan Pangan pada Pangan Segar sesuai Ketentuan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0	50	65.000.000,00	50	70.000.000,00	50	75.000.000,00	50	80.000.000,00	50	85.000.000,00		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	0	50	65.000.000,00	50	70.000.000,00	50	75.000.000,00	50	80.000.000,00	50	85.000.000,00		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.386.000.000,00		5.920.000.000,00		2.973.000.000,00		3.068.000.000,00		3.116.000.000,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				387.000.000,00		3.804.000.000,00		805.000.000,00		821.000.000,00		822.000.000,00		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.2	1	387.000.000,00	1	3.804.000.000,00	1	805.000.000,00	1	821.000.000,00	1	822.000.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				262.000.000,00		274.000.000,00		275.000.000,00		286.000.000,00		287.000.000,00		
Tersedianya Data Produksi Perikanan Tangkap yang Akurat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00		
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				32.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Memadai	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0	4	230.000.000,00	4	240.000.000,00	4	240.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00		
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2	4		4		4		4		4			
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				130.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2	4	130.000.000,00	4	140.000.000,00	4	140.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00		
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				100.000.000,00		3.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Memadai	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	1	100.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				100.000.000,00		3.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	1	100.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.197.000.000,00		1.254.000.000,00		1.285.000.000,00		1.331.000.000,00		1.357.000.000,00		
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	-8.02 %	1	1.197.000.000,00	1	1.254.000.000,00	1	1.285.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.357.000.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.097.000.000,00		1.154.000.000,00		1.185.000.000,00		1.231.000.000,00		1.257.000.000,00		
Terjaminnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Memadai	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	20	955.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.025.000.000,00	20	1.070.000.000,00	20	1.095.000.000,00		
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	6		6		6		6		6			
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				525.000.000,00		525.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		575.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	30	20	525.000.000,00	20	525.000.000,00	20	550.000.000,00	20	550.000.000,00	20	575.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	15	250.000.000,00	15	275.000.000,00	15	275.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	6	180.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	220.000.000,00	6	220.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Baik	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	4	110.000.000,00	4	120.000.000,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000,00		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	4	110.000.000,00	4	120.000.000,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000,00		
Tersedianya Data Produksi Perikanan Budidaya yang Akurat	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00		
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				32.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				802.000.000,00		862.000.000,00		883.000.000,00		916.000.000,00		937.000.000,00		
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	1.19	1.26	802.000.000,00	1.27	862.000.000,00	1.28	883.000.000,00	1.29	916.000.000,00	1.30	937.000.000,00	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				52.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		
Tersedianya Data Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Akurat	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				32.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	35.000.000,00	4	36.000.000,00	4	37.000.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Perizinan bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Baik dan Sesuai Standar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	5	20.000.000,00	5	23.000.000,00	5	23.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				20.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	5	20.000.000,00	5	23.000.000,00	5	23.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Mutu Hasil bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Baik dan Sesuai Standar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0	10	80.000.000,00	10	90.000.000,00	10	90.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0	10	80.000.000,00	10	90.000.000,00	10	90.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				670.000.000,00		715.000.000,00		735.000.000,00		755.000.000,00		775.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Fasilitasi Pengolahan Hasil bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Memadai	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0	5	150.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0	5	150.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00	5	175.000.000,00		
Tersedianya Produksi Olahan Perikanan untuk Memenuhi Konsumsi Masyarakat	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.257	3.339	520.000.000,00	3.381	540.000.000,00	3.424	560.000.000,00	3.469	580.000.000,00	3.514	600.000.000,00		
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				520.000.000,00		540.000.000,00		560.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.257	3.339	520.000.000,00	3.381	540.000.000,00	3.424	560.000.000,00	3.469	580.000.000,00	3.514	600.000.000,00		

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program unggulan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun berbagai program prioritas. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang terukur dengan *outcome* yang jelas, sehingga dapat menjadi dasar dalam evaluasi pencapaian pembangunan. Rincian program prioritas tersebut disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 4 Daftar Program Prioritas dalam Mendukung Program Unggulan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran	1. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunnya Desa Rawan Pangan	a) Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	a) Jumlah dokumen peta kerawanan dan ketahanan pangan - Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan
				b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	b) Jumlah laporan penanganan desa rawan pangan - Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
		2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	- Meningkatkan Cadangan Pangan - Mewujudkan Konsumsi Pangan	a) Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	a) Jumlah cadangan pangan yang dikelola - Rencana Kebutuhan Pangan Lokal - Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Pangan Masyarakat	Sesuai Angka Kecukupan Gizi	- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	- Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah/Kabupaten/Kota - Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota - Jumlah LPM yang terfasilitasi
				b) Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota - Pemantauan Stok Pangan	b) Jumlah laporan penyaluran pangan yang terlaksana - Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia - Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota - Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal - Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan - Informasi Stok Pangan - Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis - Informasi Neraca Bahan Makanan - Informasi Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	c) Angka Konsumsi Pangan - Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	a) Jumlah rekomendasi pelaku usaha yang difasilitasi penerbitan TDU, Jumlah dokumen pendataan pengolah dan pemasar - Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				- Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				b) Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil - Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko	b) Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Mutu Dan Keamanannya - Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko
				c) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	c) Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Difasilitasi, Jumlah Produksi Pengolahan Ikan - Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi
2	Menjadikan Kabupaten Nganjuk Sebagai Agropolitan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Tersedianya Sarpras Cadangan Pangan Yang Berkualitas	a) Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	a) Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia, Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Dan Pendukungnya

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Kemandirian Pangan		- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya - Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	- Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia - Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik - Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tersedia
		2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	a) Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	a) Jumlah Dokumen Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap Yang Tersedia - Jumlah Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Darat Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia - Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Terjamin Tersedia
				b) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	b) Jumlah Pelaku Usaha yang dibina - Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
				c) Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	c) Jumlah pelayanan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Tersedia - Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	a) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	a) Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kapasitasnya - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas
				b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	b) Jumlah dokumen pendataan produksi perikanan budidaya, Jumlah dokumen sampel kesehatan ikan yang diuji, Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia - Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota - Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota - Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan - Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat - Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	- Meningkatkan Cadangan Pangan - Mewujudkan Konsumsi Pangan	a) Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	a) Jumlah cadangan pangan yang dikelola - Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Pangan Masyarakat	Sesuai Angka Kecukupan Gizi	- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota - Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah/Kabupaten/Kota - Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota - Jumlah LPM yang terfasilitasi
				b) Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota - Pemantauan Stok Pangan	b) Jumlah laporan penyaluran pangan yang terlaksana - Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia - Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota - Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal - Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan - Informasi Stok Pangan - Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				- Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis - Informasi Neraca Bahan Makanan - Informasi Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	c) Angka Konsumsi Pangan - Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun - Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pangan Segar Yang Aman	a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	a) Jumlah perizinan pangan segar yang diterbitkan, Jumlah dokumen sampel pangan yang diuji, Jumlah Dokumen produk pangan segar yang naik kelas - Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	- Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
		6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a) Jumlah rekomendasi pelaku usaha yang difasilitasi penerbitan TDU, Jumlah dokumen pendataan pengolah dan pemasar - Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko - Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				b) Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil - Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko	b) Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Mutu Dan Keamanannya - Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko
				c) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	c) Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Difasilitasi, Jumlah Produksi Pengolahan Ikan

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				- Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi
3	Revitalisasi Bidang Peternakan Dan Pertanian Serta Subsidi Pupuk	1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a) Jumlah rekomendasi pelaku usaha yang difasilitasi penerbitan TDU, Jumlah dokumen pendataan pengolah dan pemasar - Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko - Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				b) Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil - Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko	b) Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Mutu Dan Keamanannya - Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				c) Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	c) Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Difasilitasi, Jumlah Produksi Pengolahan Ikan - Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi
		2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	a) Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	a) Jumlah Dokumen Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap Yang Tersedia - Jumlah Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Darat Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia - Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Terjamin Tersedia
				b) Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	b) Jumlah Pelaku Usaha yang dibina - Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya
				c) Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	c) Jumlah pelayanan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Tersedia

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
					- Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	a) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	a) Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kapasitasnya - Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas
				b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	b) Jumlah dokumen pendataan produksi perikanan budidaya, Jumlah dokumen sampel kesehatan ikan yang diuji, Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia - Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota - Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota - Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan - Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat - Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 4. 5 Daftar Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya sarpras cadangan pangan yang berkualitas	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
			2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
			2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
			2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan Cadangan Pangan	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
			2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
		Mewujudkan konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya desa rawan pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pangan segar yang aman	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
			2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
6.			3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Kecil	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
7.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya pengolaahan dan pemasaran hasil perikanan	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan pada hasil rumusan indikator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada Renstra untuk periode pembangunan 2025-2029, jika disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk yang secara langsung mendukung pencapain tujuan dan sasaran seperti terlihat pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut ini:

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan									
2.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	71,42	73,66	75,21	76,75	77,27	78,05	78,57	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	91,70	92,77	93,37	93,97	94,57	95,17	95,77	
4.	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	-7,57	1	1	1	1	1	1	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam upaya mendukung tercapainya indikator kinerja utama secara lebih operasional dan terarah, diperlukan alat ukur yang lebih teknis dan spesifik pada tingkat pelaksanaan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Penyusunan IKK bertujuan untuk memastikan kejelasan arah capaian, keterukuran kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama periode perencanaan tahun 2025-2029.

Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Persentase cadangan pangan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	positif	%	103.98	100	100	100	100	100	100	

IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dalam hal ini pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan serta urusan bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun definisi dan formulasi perhitungan IKK mengikuti Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001